

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Sektor pariwisata pada tahun 2005 memberikan kontribusi berupa output sebesar 254,3 triliun rupiah terhadap perekonomian nasional atau setara dengan 4,48% dari jumlah output nasional, dengan komposisi Rp 50,88 triliun (20%) berupa permintaan antara dan Rp 203,4 triliun (80%) berupa permintaan akhir. Komponen permintaan akhir ini berupa konsumsi wisnus Rp 163,7 triliun, konsumsi wisman Rp 30,3 triliun, konsumsi pemerintah Rp 275 milyar, dan investasi Rp 9 triliun.

Peningkatan permintaan akhir pariwisata sebesar 10% (Rp 20,34 triliun) akan berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 0,32% (Rp 18,17 triliun).

2. Peran sektor pariwisata terhadap upah dan gaji nasional adalah sebesar 41,2 triliun rupiah atau setara dengan 5,31%. Dengan tenaga kerja berjumlah 3,2 juta orang, maka rata-rata upah dan gaji tenaga kerja di sektor pariwisata adalah Rp 1,1 juta per bulan.

Peningkatan output pariwisata sebesar 10% (Rp 25,43 triliun) akan berdampak terhadap peningkatan upah dan gaji pada perekonomian nasional sebesar 0,87% (Rp 7,6 triliun) dan menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 418.382 orang pada perekonomian nasional atau meningkat 0,47% dari total 89,6 juta tenaga kerja pada tahun 2005.

3. Jika jasa angkutan dan jasa penunjang angkutan dimasukkan ke dalam klasifikasi sektor pariwisata, maka peningkatan permintaan akhir pariwisata sebesar 10% (Rp 37,7 triliun) akan berdampak terhadap peningkatan output nasional sebesar 0,8% (Rp 45,76 triliun). Begitupun dengan dampak terhadap pendapatan dan tenaga kerja, apabila sektor jasa angkutan dan jasa penunjang angkutan diikutsertakan dalam klasifikasi sektor pariwisata, maka peningkatan output pariwisata sebesar 10% (55,77 triliun) akan berdampak terhadap peningkatan upah dan gaji pada perekonomian nasional sebesar 2,28% (Rp 17,7 triliun) dan menciptakan

lapangan pekerjaan sebesar 1.723.141 orang pada perekonomian nasional atau meningkat 1,92% dari total 89,6 juta tenaga kerja pada tahun 2005.

4. Pendefinisian sektor pariwisata sangat sensitif terhadap pengklasifikasian sektor-sektor di dalam perekonomian, sehingga harus hati-hati dalam menilai dampak dari sektor pariwisata terhadap perekonomian.
5. Sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki keterkaitan yang tinggi dengan sektor hulunya, hal ini terlihat dari nilai indeks keterkaitan ke belakang yang di atas rata-rata. Peningkatan permintaan akhir pariwisata sebesar 10% (Rp 20,34 triliun) berdampak terhadap peningkatan output sebesar Rp 2,45 triliun pada sektor perdagangan, Rp 1,4 triliun pada sektor unggas dan hasil-hasilnya, dan Rp 1,24 triliun pada sektor beras.

Pada indeks keterkaitan ke depan, sektor perhotelan serta sektor jasa hiburan dan rekreasi pemerintah memiliki nilai indeks dibawah rata-rata, yang berarti belum mampu mendorong pertumbuhan sektor hilirnya. Nilai indeks keterkaitan kebelakang yang lebih tinggi daripada keterkaitan ke depan dikarenakan permintaan untuk sektor pariwisata lebih banyak merupakan permintaan akhir atau langsung dikonsumsi oleh konsumen.

6.2. Saran Kebijakan

1. Menyangkut penciptaan kesempatan kerja, tahun 2005 industri pariwisata Indonesia cenderung masih padat modal dengan *share* input untuk upah dan gaji sebesar 32% dan input barang sebesar 68% yang hanya mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak 16.450 orang di seluruh perekonomian setiap peningkatan output sebesar 1 triliun rupiah. Padahal kebijakan pemerintah pada periode repelita menempatkan pariwisata sebagai sektor prioritas dalam bidang ekonomi bagi penerimaan devisa dan pembukaan lapangan kerja. Sasaran kebijakan Indonesia ini perlu lebih diarahkan untuk memelihara posisi strategis industri pariwisata dan untuk meningkatkan efektivitas dengan memastikan bahwa dampak industri pariwisata senantiasa dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan umum pembangunan negara secara nasional.

2. Melihat permintaan akhir sektor hiburan, rekreasi, dan kebudayaan pemerintah yang hanya 10,9 triliun per tahun dan publikasi *Tour and Travel Competitiveness Index* yang menempatkan Indonesia pada peringkat 80 dunia pada produksi MICE, atraksi budaya serta keberadaan situs-situs budaya, maka pemerintah perlu meningkatkan produksi pada sektor ini.
3. Secara umum bagi daerah yang memiliki prioritas pengembangan daerah pada sektor pariwisata, maka investasi perlu di arahkan pada sektor-sektor yang dapat meningkatkan permintaan akhir sektor pariwisata seperti :
 1. sektor jasa hiburan, rekreasi & kebudayaan pemerintah,
 2. sektor jasa angkutan darat, udara, laut, sungai, dan danau,
 3. Sektor jasa penunjang angkutan.
 4. Sektor listrik dan air bersih, serta
 5. Sektor komunikasi.

6.3. Keterbatasan Penelitian

1. Model yang dipakai adalah tabel I-O tahun 2005, sehingga periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini sudah cukup lama. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya digunakan tabel I-O yang termutakhir, atau dilakukan pemutakhiran tabel I-O.
2. Penulis menghadapi kendala pada data tenaga kerja sektor pariwisata yang sesuai dengan klasifikasi sektor yang diinginkan oleh penulis, oleh karena itu penulis menggunakan data tenaga kerja di sektor pariwisata dari *Asia-Pacific Human Development Report 2006 (Aibara dan Gopalani, 2006)*, sehingga Pada analisa employment multiplier penulis memakai Tabel I-O 11 sektor, karena tidak didapatkan data yang terperinci mengenai jumlah tenaga kerja di Indonesia pada klasifikasi 175 sektor.